ISSN: 2252-8318

JURNAL ILMU KOMUNIKASI (JIKOM)

Volume 1 No. 3 April 2013

Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karvawan Di PT. Telkom Dinas Niaga Manado.

Oleh : Daisy Warouw

Analisis Isi Pesan Komunikasi Rubrik Kotamobagu Pada Harian Manado Post.

Oleh: Johny Josep Senduk

Efektivitas Komunikasi Kelompok Dalam Menunjang Pembangunan Pertahun.

Oleh : Antonius Boham

Profesionalisme Aparat Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Oleh : Arie Junus Rorong

Penerapan Prinsip "Complete Staff Work" Dalam Rangka Efektivitas Pengambilan Keputusan Pada Kantor BKKBN Kota Manado. Oleh: Marlien T. Lapian

Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta) Oleh: Doliuna L. Tampi

Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara.

Oleh : Martha Ogotan

Mengapa Enkulturasi Pancasila Gagal.

Oleh: Rieke Carolina Sumilat

Pembangunan Sebagai Pemanfaatan Dan Pengarahan Masyarakat.

Oleh : Juliana W. Tumiwa

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

ISSN: 2252 - 8318

JURNAL ILMU KOMUNIKASI (JIKOM)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Volume 1 No. 3 April 2013	
Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Di PT. Telkom Dinas Niaga Manado. Oleh: Daisy Warouw	1-8
Analisis Isi Pesan Komunikasi Rubrik Kotamobagu Pada Harian	
Manado Post. Oleh : Johny Josep Senduk	9-25
Efektivitas Komunikasi Kelompok Dalam Menunjang Pembangunan Pertahuan. Oleh: Antonius Boham	26-37
Profesionalisme Aparat Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Oleh: Arie Junus Rorong	38-51
Penerapan Prinsip "Completed Staff Work" Dalam Rangka Efektivitas Pengambilan Keputusan Pada Kantor BKKBN Kota Manado. OLeh: Marlien T. Lapian	51-57
Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Oleh: Dolina L. Tampi	58-72
Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Oleh: Martha Ogotan .	73-87
Mengapa Enkulturasi Pancasila Gagal. Oleh : Rieke Caroline Sumilat .	88-97
Pembangunan Sebagai Pemanfaatan Dan Pengarahan Masyarakat. Oleh: Juliana W. Tumiwa	98-111

JURNAL ILMU KOMUNIKASI (JIKOM)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Penanggung Jawab:

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Dra. D. M. D. Warouw, M.Si

Pemimpin Redaksi

Petrus Sampoel Grace Waleleng M. Sondakh

Anggota Redaksi

J. J. Senduk A. Boham J. Kalangi Edmon Kalesaran

Dewan Ahli

Soleh Sumirat (Universitas Padjadjaran) Warnes Kakansing (Universitas Negeri Manado) Grace Waleleng (Universitas Sam Ratulangi)

Lay Out Stefanus R. Juraman

Diterbitkan oleh

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jln. Kampus Barat, Bahu - Manado

Telepon : (0431) 862586

E-mail : jikom@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi kehidupan dan menyelenggarakan kehidupan kita. Kita patut berterima kasih pula kepada pihak-pihak khususnya pegawai Jurusan Ilmu Komunikasi, karena telah berusaha dan menerbitkan Jurnal ini. Kita patut mensyukuri, karena dengan adanya penerbitan Jurnal Ilmu Komunikasi maka para Dosen dapat menyalurkan kebutuhan akan penulisan artikel sehingga meningkatkan bahkan memajukan ilmu pengetahuan komunikasi di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Terima kasih khususnya pada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memotivasi dan membantu sehingga Jurnal ini dapat diterbitkan. Terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota-anggota redaksi serta dosen-dosen yang memberi kontribusi artikel ilmiahnya sehingga jurnal ini diterbitkan.

Akhir kata, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penerbitan Jurnal Ilmu Komunikasi ini dan semoga dengan jurnal ini ilmu komunikasi dapat lebih berkembang.

Salam dan Hormat Kami

Ketua Jurusan Komunikasi

PEMBANGUNAN SEBAGAI PEMANFAATAN DAN PENGARAHAN MASYARAKAT

Juliana W. Tumiwa

Abstract: The national development is oriented to rural development to enchange the wellfare of peoples in the rurals or villages by working some activity of development such as: activity based on village donation or helping, the enchancement of the apparatures of village government, the resettlement of inhabitants, the rehabilitation of poor region, and the administration of village government.

Keyword: Development, Rural, Apparaturs

L PENDAHULUAN

Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses dinamis, dimana kebijaksanaan dalam pembangunan harus tetap berjalan dan mengandung kepastian serta kesinambungan pelaksanaannya yang efektif menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan Keridhoan Tuhan Yang Maha Esa.

Usaha-usaha pemikiran dalam pembangunan, perkembangannya juga mendapatkan perspektif perspektif baru berdasarkan pengalaman dalam usaha-usaha pembangunan berbagai masyarakat bangsa-bangsa, pencapaian tujuan dan usaha pembangunan melihat pula pada kenyataan-kenyataan yang hidup dalam dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Prof. H. Bintoro Tjokroaminoto dan Drs. Mustopadidiava A. R. dalam buku mereka "Teori Strategi Pembangunan Nasional".

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep yang statis, Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan adalah merupakan juga suatu perubahan sosial budaya.

Pembangunan agar menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju di atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.

Dr. Soedjatmoko, mengatakan bahwa pembangunan tergantung dari suatu innerwill, proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karma proses pendewasaan. Suatu proses pembangunan pada pokoknya adalah suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik.

Saul M. Katz dalam bukunya "A System Approach to Development", mengemukakan bahwa pada akhirnya supaya perubahan-perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perlulah proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat itu sendiri. Tetapi harus diakui juga di negara-negara sedang berkembang, kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat disebut autonomis energis, demikian pendapat dari M. J. Esman.

Pengertian pembangunan dalam GBHN pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Perubahan yang dimaksud agar supaya dapat lebih meningkatkan taraf hidup bangsa. Sedangkan tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai.

Menurut DR. S. P. Siagian, MPA (dalam bukunya Adminishasi Pembangunan, edisi keenam, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1980 : 2-3), menyatakan bahwa pembangunan itu merupakan sebagai suatu usaha atau suatu rangkaian usana pertumbunan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu negara, bangsa dan pemerintah untuk menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building).

Dari definisi di atas terkandung suatu pengertian bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses yang berarti suatu kegiatan yang berjalan terus menerus, walaupun dalam pelaksanaannya nanti proses itu masih dapat dibagi-bagi dalam pertahapan-pertahapan atau suatu proses yang dilakukan secara

sadar atau berencana yang berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan dimana semuanya itu ditentukan bangsa itu sendiri. Dan sebagai contoh dapat kita lihat pada negara kita sendiri yang mana proses nembangunannya dilakukan dengan sistem pembangunan Lima Tahun (Pelita).

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan kita sekarang ini menginjak pada pelita V, namun pertahapan-pertahapan itu tidak dapat dipisah-pisahkan karena suatu pembangunan itu merupakan suatu keseluruhan dalam usaha untuk membangun negara atau bangsa.

Kemudian unsur yang penting yang terkandung dalam pengertian pembangunan itu adalah suatu usaha yang secara sadar, artinya pembangunan kalau dilakukan tanpa usaha sadar, maka sudah tentu pembangunan yang dilakukan atau dilaksanakan itu akan sia-sia karena tidak direncanakan secara matang dan secara sadar sebelumnya.

Dalam definisi di atas juga bahwa pembangunan itu sangat penting untuk modernisasi. Artinya kalau pembangunan itu tidak berorientasi pada modernisasi berarti pembangunan itu tidak berjalan atau sama maknanya dengan tidak membangun. Disini mengandung pengertian bahwa suatu pembangunan itu haruslah merupakan perubahan ke arah positif, atau dapatlah dikatakan merubah keadaan dari yang sudah ada ke arah yang lebih baik lagi.

Salah satu ciri dari pada masyarakat yang telah mencapai pembangunan pada tingkat modernitas yang tinggi adalah bahwa suatu masyarakat itu sudah semakin dapat melepaskan dan dari tekanan dan kekangan-kekangan alam, bahkan dapat menguasai alam dan sekelilingnya.

Modernitas dari pada pembangunan yang dicapai itu bersitat Multi-dimensional, yang mana artinya bahwa modernitas itu mencakup keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama pada aspek politik, aspek sosial, aspek budaya dan aspek keamanan dan pertahanan nasional dan administrasi.

Dengan ini jelaslah bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu mencakup segala aspek itu, yang tujuannya adalah tidak lain untuk menuju pembinaan serta kemajuan bangsa.

Kalau secara operasional, dalam negara Republik Indonesia untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (repelita) bahwa menggariskan bahwa pembangunan itu dapat diartikan sebagai :

Usaha sadar untuk mengubah nasib; Pembangunan adalah ikhtiar untuk mengubah nasib di masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik, juga suatu usaha yang terus menerus untuk berbuat yang lebih baik lagi, di dalamnya terkandung pula niat untuk mewariskan masa depan yang lebih baik, untuk membahagiakan bagi, generasi yang akan datang (Repelita II, Jilid pertama, Departemen Penerangan Republik Indonesia).

Negara Republik Indonesia dewasa mi sedang dalam pelaksanaan pembangunan dengan Repelita.

Pelaksanaan pembangunan ini mempunyai tujuan yang tidak lain dari pada mewujudkan apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu; "Mewujudkan Masyarakat Yang Adil dan Makmur".

Prof. Selo Soemardjan dalam bukunya Pembangunan Politik dan Perubahan Politik (1981 : 120), terbitan PT. Gramedia Jakarta, (dikutip oleh Juwono Soedarsono), mengatakan bahwa pembangunan itu adalah merupakan proses penyisihan secara bertahap beberapa faktor sosial budaya yang disusul dengan usaha-usaha pelik dalam menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru, teknologi baru dan cara-cara organisasi dan cara kerja yang baru.

Bintaro Tjokromidjojo, dalam bukunya Pengantar Administrasi Pembangunan, 1978: 222, Jakarta; yang menyatakan bahwa pembangunan itu adalah merupakan suatu proses pembaharuan yang sangat kontinyu dan terus menerus dan suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Dari beberapa definisi dan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pembangunan itu sebenarnya tidak lain adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau suatu negara secara sadar, dimana perubahan tersebut adalah bersifat positif, atau yang mengarah pada suatu keadaan yang lebih baik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Jadi pada prinsipnya pembangunan disini adalah merupakan suatu perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama guna berusaha untuk mencapai ke arah tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial yang secara murni.

Demikian suatu uraian tentang pokok pengertian dalam pembangunan yang bertujuan untuk berubah tingkat taraf kehidupan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Masyarakat

Pengertian tentang masyarakat ada bermacam-macam. Hal ini dapat kita lihat melalui batasan dari beberapa ahli :

- Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, masvarakat adalah kesatuan hidup mahluk-mahluk, manusia yang terikat oleh satu kesatuan ada istiadat tertentu. Pandangan tersebut di atas ditekankan adanya keterikatan individu-individu, kedaulatan adat istiadat tertentu sering timbul kekacauan serta pertikaian yang tidak hentinya, di samping itu tidak ada rasa persatuan, tolong menolong antara satu sama lain.
- Menurut Hasan Shadily bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lain.
- Menurut Drs. Suparto, masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubung-hubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
- Menurut Khoe Soe Kian, masyarakat ialah sekelompok manusia yang merupakan kesatuan daerah fungsional dan kebudayaan.
- Menurut J. B. A. F. Mayor Polak, masyarakat adalah (wadah segenap antara hubungan sosial) terdiri atas banyak sekali kelompok atau tiap-

- tiap kelompok terdiri atas kelompok lebih kecil atau sub kelompok (Sosiologi suatu Pengantar Ringkas).
- Menurut M. Ginsberg, masyarakat adalah wadah seluruh antara hubungan (interrelation) sosial seluruh jaringan dalam arti umum tanpa menentukan suatu batas tertentu.
- Menurut Kingsley Davis, masyarakat adalah sistem hubungan-hubungan dalam arti anti hubungan antara organisasiorganisasi dan bukan hubungan antara sel-sel.
- Menurut Dr. Phill Astrid Susanto, masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang berdasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapatlah penulis menarik kesimpulan bahwa walaupua dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut di atas terdapat perbedaan namun pada dasarnya mereka sependapat bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia yang hidup pada suatu daerah dan saling berhubungan satu sama lain yang mempunyai adat istiadat tertentu.

Perubahan Masyarakat

 Perubahan Masyarakat Sebagai Fakta

Dimana-mana dirasakan. bahwa perubahan masyarakat merupakan kenyataan yang dibuktikan gejala-gejala oleh seperti dipersonalisasi, adanya frustasi dan (kelumpuhan apati mental). pertentangan dan perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila yang sebelumnya dianggap mutlak, adanya pendapat generation gup (jurang

pengertian antara generasi) dan lainlain.

Memang ada tidaknya suatu perubahan masyarakat. vaitu terganggunya keseimbangan (equilibrium) antar satuan sosial (social units) dalam masyarakat, hanya dapat dilihat melalui gejalaini. Banyak gejala penyebab perubahan masyarakat, yaitu antara ilmu pengetahuan (mental manusia), kemajuan teknologi serta penggunaannya oleh masyarakat, komunikasi dan transport, urbanisasi, perubahan/peningkatan harapan dan tuntutan manusia (rising demands); ini mempengaruhi semua akibat mempunyai terhadap masvarakat vaitu perubahan masyarakat melalui kejutan dan karenanya terjadilah perubahan masyarakat yang biasa disebut rapi sosial change.

 Perubahan masyarakat sebagai kemunduran (regress) dan kemajuan (progress)

Perubahan masyarakat dalam arti luas, diartikan sebagai perubahan atau perkembangan dalam arti positif maupun negatif. Pada umumnya motivasi (Pengaruh terhadap perubahan, harapan dan kebutuhan mental dan materi) disebabkan oleh kemajuan teknik. Tetapi karena setiap penemuan teknik mempunyai akibat terhadap mental manusia, penggunaan penemuan teknik (teknologi) dapat mengakibatkan perubahan masyarakat di segala sektor yaitu mengubah pendapat dan penilaian orang terhadap apa yang hingga saat penggunaan penemuan tadi dianggap mutlak, tidak dapat berubah. Perubahan penilaian tadi terjadi karena inner construction dan falsafah manusia disangsikan,

karena penemuan teknik serta penggunaannya meminta falsafah hidup yang baru dan manusia.

Dimana perubahan konstruksi dalam manusia dan karenanya pada satu satuan sosial tentunya akan mempunyai akibat perubahan hubungan antara satuan sosial, dengan sendirinya keseimbangan dalam suatu masyarakat untuk waktu tertentu yaitu karena terganggu, perubahan sikap pada suatu satuan sosial minta perubahan sikap pada satuan sosial lainnya dengan akibat bahwa seluruh pola masyarakat berubah pula.

Dalam perubahan yang serba multikompleks ini dengan sendirinya ada dua kemungkinan, yaitu:

- Bahwa manusia menemukan sistim nilai dan falsafah hidup yang baru.
- Manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap/keputusan terhadap keadaan baru.

Akibat yang kedua inilah yang menyebabkan bahwa manusia mengalami frustasi bahkan apati.

Sebaliknya keadaan dimana manusia berhasil menemukan sistim nilai dan falsafah hidup baru, mencerminkan keadaan bahwa manusia berhasil mengatasi krisis yaitu berhasil mengambil keputusan.

 Sejarah dan Akibat Perubahan Masyarakat

Negara-negara berkembang biasanya adalah negara-negara bekas jajahan atau masyarakat negara dengan pemerintahan dinasti-dinasti yang hatiya memikirkan kekuasaan dirinya.

Sejak memperoleh

kemerdekaannya mereka harus menentukan nasibnya sendiri dalam segala bidang.

Hal ini merupakan permulaan dari perubahan besar-besaran dalam bidang mental, sosial, ekonomi dan politik.

Walaupun demikian secara historic perubahan masyarakat dalam bentuk dahsyat telah berulang kali dalam seiarah manusia. perubahan "tertua" dikenal terjadi dalam abad ke-13 dan 14 sebagai akibat kemajuan teknologi. Demikian juga telah dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa keruntuhan Imperium Romawi adalah juga akibat perubahan masyarakat yang tidak teratasi. Setiap perubahan masyarakat tidak berdiri sendiri, demikian juga dalam abad ke-20 ini, perubahan masyarakat terjadi sebagai akibat penggunaan penemuanpenemuan baru di seluruh dunia.

Sebab itu setiap perubahan masyarakat mempunyai wilayah inti (Kernland) dan wilayah tepi (Randland, 1).

Fakta di seluruh dunia sebagai akibat masyarakat massa dan perubahan masyarakat ialah :

- Bertambahnya volume tuntutan dan kebutuhan
- Bertambahnya aneka ragam kebutuhan dan tuntutan
- Bertambahnya tuntutan akan kebebasan dan ekses-eksesnya
- Bertambah intensifnya polarisasi kekuasaan eksekutif
- Bertambahnya specialisasi sebagai hal yang tak terelakan dan bertambahnya kebutuhan akan adanya organisasi
- Bertambah lebarnya jurang antara yang diperintah dan yang memerintah, juga jurang antara yang berspesialisasi dan yang tidak.

- g. Hilangnya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial dengan titik berat pada eksekutif.
- Proses sosial sebagai penyebab perubahan masyarakat

Dalam proses sosial diketahui bahwa ada proses integrasi dan disorganisasi sebagai fase yang mendahului disintegrasi.

Sumber dalam folkways berpendapat bahwa manusia dalam setiap masyarakat mempunyai kecenderungan desakan akan konsistensi dengan tentunya akibat konsentrasi atau pengelompokkan.

Marton seorang ahli Sosiologi menemukan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat desakan akan pemisahan diri/anomi. Dengan demikian demi kelangsungan hidup masyarakat, anomi setiap masyarakat yang diusahakan diimbangi oleh proses integrasi.

Durkheim mengenal dua bentuk anomi yaitu :

- a. Simple anomie (anomi sederhana)
- b. Accute anomie (anomi gawat)

Karena dalam setiap masyarakat demokrasi manusia dianjurkan untuk berdiri sendiri dan berfikir sendiri; maka anomi sederhana yaitu pertentangan antara manusia tidak dapat dihindari, selama anomi ini hanya berbentuk anomi sederhana, maka anomi itu mudah dikembalikan kestabilitas.

Lain halnya apabila anomi sederhana mencapai taraf anomi gawat yaitu karena dalam keadaan ini telah terdapat suatu proses disintegrasi khususnya karena yang dipersoalkan ialah ketertiban dan pertahanan normal. Salah satu contoh anomi yang terjelas tindakan kaum intelek

Indonesia pada pertukaran abad ke-19 menuju abad ke-20 yaitu melepaskan diri dari ikatan trandisionalnya dan sebagai langkah pertama membentuk Budi Utomo.

Bentuk-bentuk perubahan sosial dalam masyarakat

Pada umumnya dikenal perubahan sosial dalam beberapa jenis

- a. Social evolution (evolusi sosial)
- b. Social mobility (mobilitas sosial)
- c. Social revolution (revolusi sosial)

Yang dipersoalkan dalam perubahan sosial ialah mental evolution sebagai berikut :

- 1) Perubahan teknologi
- 2) Perubahan kebudayaan

Dalam rangka ini, dikenal pengaruh teknologi terhadap :

- Kelompok-kelompok sosial sendiri dengan akibat yang makin kompleks, dan
- Kebudayaan (contoh : gedunggedung dan teknik).

Semua bentuk perubahan dapat berbentuk perubahan radikal maupun perubahan yang lambat.

Bagaimana dahsyatnya perubahan tergantung dari lingkungan dan manusianya sendiri.

Dengan demikian inti perusahaan sosial adalah: "Survival depends neither on their flexibility nor their suppleness but on their ability to meet both the changeless and the changing human needs".

Ada juga perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mempunyai variasi-variasi sebagai berikut:

a) Penanganan terhadap keseimbangan Hanya terjadi satu kali, kegiatan

rangsanganya sebagai Permulaan

tesjadinYa satu perubahan yang total yang terjadi sekonyongkonyongnya.

Bentuk demikian dapat mengakibatkan kehancuran dan sistim, disebut disintegrasi.

b) Benturan-benturan terhadap keseimbangan Terjadinya beberapa kali usaha untuk memasukkan pengaruh

terhadap keseimbangan, tiap kali ternyata dapat menimbulkan keseimbangan yang baru yang disebut siklus, misalnya;

- konjungtur dalam ekonomi

- calypso menjadi gendrong
- aktivitas musim dari kerajinan
- Perubahan kumulatif, makin lama makin kuat, yang disebut evolusi atau kemajuan, kalau turun disebut degenerasi, kalau terjadi bersamasama, sejalan berarti pembaharuan total.

Demikianlah tentang perubahan-perubahan yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan-perubahan tersebut sangat diharapkan oleh setiap individu, akan tetapi yang berwujud perubahan memperoleh kemajuan dalam perkembangan, seperti perubahan dari struktur Orde Lama ke struktur Orde Baru, yang ternyata telah menimbulkan banyak perubahan yang menghantarkan rakyat Indonesia ke arah tercapainya masyarakat adil dan makmur yang menyeluruh.

 Sumber dari perubahan dalam masyarakat

Pada umumnya yang menjadi sumber dari terjadinya perubahanperubahan dalam masyarakat (baik all change maupun cultural change) terdapat:

a. Sumber intern

b. Sumber ekstern

Sumber intern meliputi inventions penemuan baru, faktor penduduk misalnya dan faktor teknik.

Sumber ekstern dapat berupa pemasukan pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya kebudayaan asing yang mempengaruhi kebudayaan sendiri (diffusi kebudayaan). Dalam diffusi kebudayaan ini dapat terjadi pengaruh timbal baik misalnya turis-turis asing yang datang dapat memasukkan kebudayaannya tetapi sebaliknya kebudayaan kita dapat masuk pula kepada mereka, seperti adanya hasrat mempelajari tari serimpi, mempelajari tata adat dan sebagainya, jadi disini ada pengaruh timbal balik.

Majunya media komunikasi massa merupakan alat yang ampuh untuk memasukkan pengaruh sehingga pihak yang lain dapat menerima pengaruh tersebut seperti misalnya TV, film, radio, majalah, merupakan alat alukturasi.

Sumber-sumber dari perubahan-perubahan di atas disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial seperti misalnya lembaga ekonomi, pemerintahan, agama, pendidikan, rekreasi, keluarga dan lain-lain.

Lembaga-lembaga inilah yang dapat mengadakan hubungan erat dengan para anggotanya dalam hubungan dimasukkan pengaruh-pengaruh yang dapat menimbulkan baik berupa social change, maupun cultural change.

Tentang pemasukan pengaruhpengaruh tersebut tidak selamanya memperoleh kelancaran, hal ini disebabkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya seperti:

a. Tidak terdapatnya potensi-potensi

dalam inventions, seperti misalnya, tak adanya sarana-sarana untuk menciptakan inventions; tak cakapnya pemberi pengaruh dalam melaksanakan maksud-maksudnya.

- Kelompok atau masyarakat teguh dalam sikapnya.
- Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
- d. Vested interest.
- e. Adanya penolakan dari masyarakat terhadap inventions tersebut.

Sebaliknya terdapat pula faktor-faktor yang membantu atau panghalang, di dapat pula faktor-faktor yang membantu atau mempermudah terlaksananya pemasukan pengaruh-pengaruh tersebut, antara lain :

- Adanya sikap tertarik dan menghargai inventions.
- Penilaian umum bahwa pengaruh itu akan menimbulkan kemajuan.
- Adanya sistim pendidikan yang progresip.
- Terdapatnya toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebiasaan.
- Terjadinya sosial disorganization, dimana folkways, mores sudah kehilangan kekuatan mengikatnya dan lembaga-lembaga sosial yang ada sudah berantakan organisasinya.

II. PEMBANGUNAN SEBAGAI PEMANFAATAN DAN PENGARAHAN PERUBAHAN MASYARAKAT

Pemanfaatan Perubahan Masyarakat Untuk Pembangunan

Rencana-rencana pembangunan ialah pemanfaatan dan pengarahan dari perubahan masyarakat Perencanaan selalu dilakukan secara umum, dari Repelita jelaslah bahwa maksud Repelita bukan menjadi rencana terperinci, melainkan sekedar menjadi pengarah dan garis besar rencana dalam lima tahun yang mendatang dicakupnya; perencanaan terperinci haruslah dibuat oleh daerah-daerah sendiri khususnya melalui BAPPEDA sesuai dengan :

- a. Pengarahan yang diberikan oleh Repelita
- b. Kebutuhan setempat
- Kenampakan fisik dan manusia setempat

Salah satu unsur penting dalam pembangunan dalam masa Repelita III ialah realisasi 8 jalur pemerataan. Sesuai dengan GBHN mengenai pembangunan Daerah dan Pembangunan Pedesaan pengarahannya ialah sebagai berikut :

"Dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, maka dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan sehat, serta peningkatan penduduk kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.

Untuk itu berbagai program pembangunan sektoral perlu lebih diserasikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing daerah, sedang program-program Inpres perlu disempumakan, dilanjutkan dan diperluas.

Dalam hubungan ini daerah-

daerah minus dan daerah-daerah yang padat penduduknya perlu mendapat perhatian khusus, antara lain mengurangi derasnya, perpindahan penduduk ke kota-kota besar.

Selanjutnya beberapa hal yang penting dalam rangka pengembangan daerah dan filsafat pemerataan, disebut antara lain mengenai peningkatan penghasilan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun tentang pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah, sebagai berikut : untuk makin merasakan hasil-hasil pembangunan dalam pelita ketiga, maka perlu untuk ditingkatkan program-program untuk meningkatkan penghasilan kelompokkelompok masyarakat, yang mempunyai pencaharian yang masih rendah, seperti nelayan, pekerja kerajinan rakyat, petani penggarap yang tidak memiliki tanah, petani memiliki tanah yang sangat kecil, buruh tanah dan sebagainya.

Demikian pula perlu dilanjutkan program-program yang memberi kesempatan lebih untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan memperkuat modalnya, meningkatkan keahlian dan kemampuan serta memperluas pemasaran.

Di dalam GBHN-78 Bab IV tentang Pola Umum Pelita Ketiga, dikemukakan tujuan pembangunan melalui pemerataan, yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahtraan rakyat secara merata.

Karena itu pertumbuhan ekonomi harus dapat meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat untuk memperluas tersedianya sarana sosial budaya, antara lain di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesehatan, sosial, agama, kebudayaan, olahraga, perumahan, pembinaan generasi muda, pengembangan lingkungan hidup serta sumber alam dan sebagainya.

Ini berarti makm meningkatnya pembangunan di bidang-bidang sosial budaya dan memperbesar kemampuan serta kesempatan rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.

Dengan makin meningkat dan meluasnya pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya dalam Pelita Ketiga maka makin meningkat dan merata pula kesejahteraan rakyat dan diharapkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi semakin kecil.

Hal ini akan makin memperbesar kesadaran rakyat akan arti pembangunan, sehingga tekad rakyat untuk melanjutkan pembangunan tahap-tahap berikutnya.

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan di desa diadakan beberapa kegiatan seperti Bantuan Pembangunan Desa, Pembinaan Unit Daerah Keija Pembangunan (UDKP), Peningkatan Prakarsa dan Swasembada masyarakat khususnya melalui Lembaga Sosial Desa (LSD), peningkatan aparat pemerintah desa, pemukiman kembali penduduk dan lain-lain, pembangunan proyek-proyek dengan sistem Padat Karva. rehabilitasi daerah rawan dan lain-lain.

Setiap kegiatan pembangunan desa mempunyai dua segi, yaitu : segi penunjang yang bersifat komersil dan yang bersifat nonkomersil. Unsur non komersil merupakan unsur yang tidak kurang pentingnya, yaitu bahwa petani memperoleh bimbingan dan nasehat setiap saat hal mana merupakan

pemasukan yang besar untuk usahanya,

Unsur non komersil inilah yang, merupakan unsur yang penting untuk memperoleh kepercayaan petani terhadap program-program Pemerintah

Selanjutnya penulis akan mengemukakan juga sedikit pengertian tentang desa menurut UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pentahapan pembangunan desa digambarkan juga oleh idea pembangunan:

- a. desa swadaya
- b. dewa swakarva
- c. desa swasembada

Desa swadaya memperlihatkan ciri adanya prasarana bagi perkembangan usaha dan kegiatan pembangunan yang meliputi :

- tempat beribadah
- sekolah dasar
- balai desa
- administrasi desa yang teratur, adanya data dan statistik desa, pola perribangunan desa dan ruang rapat
- adanya prasarana ekonomi desa seperti irigasi, jalan, jembatan, lumbung desa dan bank desa
- organisasi masyarakat desa dalam bidang ekonomi dan sosial
- desa telah mempunyai wajah yang baik

Desa swakarya sebagai tingkat

yang lebih maju memperlihatkan beberapa ciri dan kegiatan yang meiiputi:

- pusat latihan di tingkat kecamatan
- industri untuk mengolah hasil pertanian
- alat-alat mekanis untuk pertanian
- pasar desa dan bank desa
- perpustakaan desa

Sedangkan desa swasembada sebagai tingkat yang iebih maju lagi dengan memperlihatkan ciri dan kemampuan desa sebagai kesatuan yang dapat berdiri sendiri :

- sekolah kejuruan pada tingkat kecamatan
- usaha perbengkelan
- menggunakan tenaga listrik
- balai kesehatan
- balai kebudayaan dan kesenian
- lapangan olahraga

Masalah Partisipasi dan Nilai-nilai Pembangunan

Dalam GBHN dinyatakan bahwa tujuan dan pembangunan nasional adalah "untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Landasan pelaksanaan
Pembangunan Nasional di segala
bidang adalah Pancasila dan UUD 45,
dengan pokok pikiran bahwa hakekat
pembangunan nasional adalah
Pembangunan Manusia seutuhnya dan
Pembangunan seluruh Masyarakat
Indonesia.

Dalam hubungannya dengan niiai-nilai pembangunan, Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Power and Society (1969) yang menyatakan bahwa manusia mempunyai:

- walfare values (nilai kesejahteraan)
- deference values (nilai rohaniah)

Dengan nilai kesejahteraan dimaksudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh manusia karena dianggap bahwa dengan memiliki apa yang menjadi tujuan, sebagian dari kondisi yang dirasakan diperlukan manusia untuk hidup agar kebutuhan fisik dapat terpenuhi.

Sedangkan nilai ronaniah adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan orang/ kelompok lain, atau nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan antara manusia/sosial. Kembali ke masalah nilai yang dianut dalam pembangunan/kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa nilai pembangunan ditentukan sekali oleh sarana geografi, iklim. dan transporiasi yang akan memungkinkan apakah orang menitikberatkan keperluan keluarga memperhatikan orang di luar keluarganya juga, seperti tercermin dalam pengambilan tenaga kerja di bidang pertanian.

Hal ini berarti bahwa gotong royong sebagaimana dikenal, juga ditentukan oleh batasan-batasan di atas tadi. Nilai-nilai praktis ekonomi selalu terdapat dalam bentuk rasional ataupun kurang rasional.

Nilai-nilai ini sudah ditemukan dalam kebiasaan suatu desa mengatur dan menertibkan diri sendiri, hal mana berbeda dari daerah satu ke daerah yang lain.

Sebagaimana apa yang disebut Haar mencakupi landasan pembentukan nilai-nilai dalam suatu masyarakat Indonesia, vaitu terutama dalam lapisan rakyat terendah dimana situasi ini merupakan sumber dan nilai-nilai materi ataupun spiritual dan dapat merupakan sebab majunya suatu masyarakat ataupun hambatan terhadapnya. Untuk itulah dalam usaha pembangunan perlu sekali dicari sumber dan apa yang merupakan sumber pembentukan nilai di suatu masyarakat.

Peranan Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan

Maurice Zinkin dalam Development for free Asia menyebutkan peranan administrasi sebagai steel frame atau tulang punggung baja dari suatu negara.

Dari kata-kata ini jelas bagaimana peranan para petugas dalam usaha pembangunan. Walaupun demikian sering dialami bahwa para petugas sendiri kurang menyadari peranannya.

Robert T. Holt dan John E. Turper dalam The Politicas Basis of Developmet Economic (1966)menyebut beberapa fungsi yang menentukan yang perlu dijalankan administrasi negara/ pemerintahan untuk mencapai pembangunan, la menggabungkan ide dari Rostow mengenai tahap-tahap pembangunan yang dikenal dengan istilah The five stages of economic growth, dengan peranan pemerintah dalam setiap tahapnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang petugas perlu sekali memperlihatkan batas-batas obyektif maupun subyektif yang diberikan oleh lingkungan serta fasilitas dan batas kemampuan diri.

Berdasarkan inilah ia melakukan pengajaran partisipasi penduduk. Dalam mengsinkronkan diri, seorang petugas mengsinkronkan tuntutan peranan-peranan yang diharapkan dari dirinya sebagai petugas oleh masyarakat setempat. Maka terbentuklah hubungan peranan yang apabila sinkron dapat mengarah kepada partisipasi sukarela.

Karena inilah dirasakan komunikasi timbal balik sangat menentukan. Di Indonesia banyak ditemukan situasi di mana petugas dan atau tidak mengerti isi instruksi atau bersikap asal bapak senang dan sering mengorbankan kepentingan lokal demi pelaksanaan tugasnya.

Hal ini menjelaskan nilai dari petugas masih bersifat tradisional atau melaksanakan tugas secara harafiah. Hal ini mengakibatkan bahwa rakyat merasa bahwa seakan-akan partisipasi mereka diminta secara paksa, atau pelaksanaan dijalankan dengan mengatakan sebenarnya saya pribadi tidak setuju, tetapi ini merupakan instruksi atasan.

Sehubungan dengan para administrator, mereka sendiri juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan dan latar belakang mereka, sehingga partisipasi yang dimintanya juga tidak terlepas dari kebiasaan mereka meminta partisipasi di lingkungan adatnya.

III. PENUTUP

Pembangunan adalah merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Karena pembangunan itu sendiri adalah suatu proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan, walaupun dalam pelaksanaannya nanti proses itu masih dapat dibagi dalam pentahapanpentahapan untuk menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai pembangunan pada tingkat moderniras adalah bahwa suau masyarakat itu sudah semakin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam, bahkan sebaliknya dapat menguasai alam dan sekelilingnya.

Modernitas dari pada pembangunan yang dicapai itu bersifat Multi Dimensional yang artinya modernitas itu mencakup keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara terutama pada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan aspek keamanan dan pertahanan nasional dan administrasi.

GBHN Sesuai dengau mengenai pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan pengarahannya ialah "Dalam rangka makin meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan daerah pembangunan dan pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan perluasan kepada kesempatan kerja, pembinaan dan lingkungan pengembangan pemukiman pedesaan dan perkotaan sehat serta peningkatan yang kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan menanggulangi masalah-masalah yang mendesak.

Untuk itu berbagai program pembangunan sektoral perlu diserasikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing daerah, sedangkan program-program Inpres perlu disempurnakan, dilanjutkan dan diperluas.

Dalam hubungan ini daerahdaerah minus dan daerah-daerah padat penduduknya perlu mendapat perhatian khusus dengan mengurangi derasnya perpindahan penduduk ke kota-kota besar.

Pembangunan Nasional yang berorientasi kepada pembangunan pedesaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan di desa dengan mengadakan beberapa kegiatan diantaranya berupa Bantuan Pembangunan Desa, Pembinaan Unit Daerah Kerja Pembangunan, Peningkatan Prakarsa dan Swasembada masvarakat melalui Lembaga Sosial Desa, Peningkatan aparatur Pemerintah Desa, pemukiman kembali penduduk, pembangunan proyek-proyek, rehabilitasi daerah rawan dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, maka yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah administrasi pemerintahan yang dalam hal ini berperan sebagai perencanaan sekaligus sebagai pelaksanaan dari pada pembangunan itu sendiri.

Di samping itu diperlukan juga partisipasi nyata dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan karena masyarakat itu sendirilah yang akan menikmati hasil-hasil dari pada pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 1985. Sosiologi Suatu Pengantar. Cetakan Kelima, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.
- Prof. DR. Koenijaraningrat, 1969.

 Pengantar Antropologi.

 Cetakan Ketiga: Penerbit PT.

 Aksara.
- Prof. Selo Soemardjan, 1981.

 Pembangunan Politik dan

 Perubahan Politik, Jakarta:

 Penerbit PT. Gramedia.
- Drs. J. B. A. F. Mayor Polak, 1979.

 Sosiologi Suatu Buku

 Pengantar Ringkas. Cetakan

 Kesembilan, Jakarta: Penerbit

 PT. Ichtiar Baru.

- Dr. Phil. Astrid S. Susanto, 1985.

 Pengantar Sosiologi dan

 Perubahan Sosial, Cetakan
 Kelima: Penerbit Binacipta.
- G. Kartasapoetra dan R. G. Widyaningsih, 1982. Teori Sosiolngi. Bandung : Penerbit Armico.
- DR. S. P. Siagian, MPA, 1980. Administrasi Pembangunan. Edisi Keenam, Jakarta : Penerbit PT. Gunung Agung.
- Bintari Tjokramidjojo, 1978.

 Pengantar Administrasi
 Pembangunan. Jakarta.
- Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran. Tap-tap MPR Tahun 1983.